

IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA NEGARA DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI BENTUK PENGUATAN DEMOKRASI

Susi Rosiana¹, Salma Rifda Salsabila², Aisyah Lashinta Dewi³, Laila Nurul Hidayati⁴,
Lia Sari⁵, Kuswan Hadji⁶

susirosiana662@gmail.com¹, salmarifdasalsabila@gmail.com², aisyahlashinta@gmail.com³,
lailanurulh28@gmail.com⁴, slia73618@gmail.com⁵, kuswanhadji@untidar.ac.id⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Kedaulatan menjadi kekuasaan tertinggi bagi sebuah negara. Di Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat, dimana pemegang kekuasaan penuh berada di rakyat melalui wakil rakyat. Penerapan good governance menjadi faktor penting terselenggaranya negara. Melalui prinsip-prinsip good governance dapat memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan proses dan mekanisme lembaga negara dalam menjalankan perannya dengan cara menguraikan dari data dan fakta yang diperoleh dilapangan serta pemahaman mendalam mengenai peran lembaga negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik terhadap penguatan demokrasi. Mengingat ditengah banyaknya tantangan dan hambatan perlu adanya peningkatan peran bagi pemerintah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi sehingga Implementasi good governance yang lebih baik diharapkan dapat memperkuat legitimasi pemerintah dan menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: Good Governance, Lembaga Negara, Demokrasi.

Abstract: Sovereignty is the supreme power for a country. In Indonesia, sovereignty resides in the hands of the people, where the holder of full power resides in the people through the people's representatives. Implementation of good governance is an important factor in the implementation of the state. Through principles of good governance can strengthen democracy and governance in Indonesia. This research uses a qualitative approach with a descriptive analysis method that aims to describe the processes and mechanisms of state institutions in carrying out their roles by describing data and facts. Institutions in carrying out their role by describing the data and facts obtained in the field as well as an in-depth understanding of the role of state institutions. Data and facts obtained in the field as well as an in-depth understanding of the role of state institutions in good governance. Role of state institutions in good governance towards strengthening democracy. Given the many challenges and obstacles challenges and obstacles, it is necessary to increase the role of the government in realizing democratic life so that better implementation of good governance is implementation is expected to strengthen the legitimacy of the government and maintain the sustainability of democracy in Indonesia.

Keywords: Good governance, State Institutions, Democracy.

PENDAHULUAN

Kedaulatan pemerintah menjadi salah satu syarat dalam berdirinya suatu negara. Kedaulatan menjadi kekuasaan tertinggi oleh negara yang berada pada tangan rakyat. Hakikat mengenai gagasan bahwa kekuasaan tertinggi suatu negara tidak dapat dibatasi atau diintervensi oleh negara lain merupakan inti dari kedaulatan. Hakikat dari gagasan pencapaian kedaulatan dan pengambilan keputusan termasuk dalam gagasan kekuasaan tertinggi atau demokrasi. Yang dimaksud dengan istilah “hakikat negara” bukanlah hakikat negara yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan hakikat yang disebut dengan negara. Menurut Plato, “bangsa dapat diibaratkan sebagai sebuah keluarga besar, dan negara dapat diukur atau disesuaikan dengan mampu atau tidaknya negara mempertahankan kesatuannya di dalam negara”. Salah satu negara yang menganut sistem demokrasi yaitu Indonesia. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan penuh di negara dan diwakili oleh seorang wakil yang seharusnya berpihak pada rakyat.

Adanya wakil rakyat menjadi salah satu bentuk dari sistem kebijakan desentralisasi. Tata kelola pemerintahan yang baik diberikan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya untuk mengelola daerah dengan baik. Kerjasama yang efektif antara pemerintah, menetapkan undang-undang dan kebijakan, perekonomian yang digerakkan melalui sektor swasta, dan masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi secara menguntungkan dan efisien merupakan prinsip dasar tata pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik harus memiliki tiga komponen yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi untuk menunjukkan bahwa pemerintah bersih dan bebas dari korupsi. Adanya keterbukaan dengan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat menjadi ciri tata pemerintahan yang baik, yang memungkinkan partisipasi aktif dari semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, pemerintahan terbuka harus dilaksanakan secara jujur dan akuntabel. Kepentingan masyarakat menjadi pertimbangan baik dalam pelayanan yang diberikan pemerintah maupun dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk penggunaan konsep good governance dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggaraan pembangunan diharapkan dapat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi peran pokok pemerintah untuk mengelola negara. Pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya berpegang pada prinsip-prinsip dasar saja seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi, dan keadilan. Namun pemerintahan yang baik juga didasarkan pada peran pemerintah yang dapat mewujudkan prinsip tersebut. Oleh karena itu peran pemerintah sangat berpengaruh terhadap keadaan suatu daerah kekuasaannya yang mengharuskan adanya keterpaduan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat. Mendorong pemerintah untuk lebih berkonsentrasi pada peningkatan kualitas, produktivitas, efektivitas, serta efisiensi struktur administrasi secara keseluruhan termasuk peningkatan kapasitas, pelayanan, dedikasi, dan loyalitas tinggi terhadap tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya akan membantu mencapai integrasi. Hal ini akan membantu pegawai negeri dalam melakukan pekerjaannya seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik dari segi pelayanan sipil maupun publik.

Pelaksanaan prinsip good governance di Indonesia sayangnya dinilai masih belum maksimal. Masalah tersebut tampak dari beberapa fakta di lapangan, seperti tingginya tingkat korupsi dikalangan lembaga negara. Korupsi adalah konflik yang susah ditangani, menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi diketahui bahwa kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR dan DPRD sejak tahun 2004 sampai bulan Juli 2023 terdapat 344 kasus yang mana menduduki peringkat terbanyak ketiga, selain itu terdapat 349 kasus korupsi yang menjerat pejabat eselon (pejabat ASN yang duduk di instansi pemerintahan) dari golongan I hingga golongan IV. Buruknya birokrasi di Indonesia juga menjadi pemicu tidak terselenggaranya prinsip good governance untuk meningkatkan

demokrasi yang dapat dilihat melalui permasalahan terkait peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan masyarakat serta terjadi pembangkangan terhadap konstitusi. Sistem birokrasi di Indonesia pada saat ini lebih mengacu pada kepentingan politik, sehingga mengesampingkan hak-hak dari masyarakat sendiri. Kedua hal tersebut menjadi hambatan yang sangat krusial terhadap penerapan prinsip *good governance*. Dimana kebijakan pemerintah yang dianggap baik, belum tentu dirasakan baik pula oleh masyarakat. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut bisa saja hanya diperuntukkan untuk golongan-golongan tertentu. Jika hambatan tersebut tidak segera diselesaikan terutama terkait transparansi dan akuntabilitas, akan memicu timbulnya stigma negatif dari masyarakat yang ditandai dengan lunturnya kepercayaan masyarakat hingga berbagai aksi penolakan atau pemberontakan terhadap pemerintah.

Tindakan yang perlu ditegaskan oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan terkait penegakan prinsip *good governance* dapat melalui penguatan pada penegakan hukum yang tegas dan independen untuk menjaga tatanan dan keadilan bagi setiap lapisan masyarakat, keterbukaan informasi sebagai berwujudan prinsip transparansi dan bentuk dari demokrasi dalam meningkatkan dan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui segala informasi mengenai pemerintahan. Sehingga, masyarakat dapat menilai sendiri terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah dan menyampaikan aspirasi mereka berupa saran maupun kritik membangun terhadap kebijakan pemerintah. Peningkatan sumber daya manusia di dalam instansi pemerintah terkait pengawasan hingga pelayanan publik. Penerapan prinsip *good governance* bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk mewujudkan sistem demokrasi yang ideal, dengan tata kelola pemerintahan yang baik mampu memberikan batasan-batasan terhadap kekuasaan elite politik yang merugikan kepentingan umum dan mampu mencegah terjadinya oligarki dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Keberadaan dari prinsip ini menjadi landasan bagi terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Dengan begitu, penelitian ini mengkaji mengenai peran dan strategi dari pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memperkuat penerapan sistem demokrasi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menggali makna, pengalaman, dan perspektif yang kompleks dari individu atau kelompok. Pendekatan ini lebih fokus pada aspek deskriptif yang mengedepankan studi literatur dan dokumen pendukung terkait dengan judul pembahasan seperti mendeskripsikan proses dan mekanisme yang digunakan oleh lembaga negara dalam menjalankan perannya, serta mengungkap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu dimana analisa yang digunakan untuk memenuhi aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan gambaran dari data yang diperoleh lalu menghubungkannya satu sama lain hingga mendapatkan suatu kejelasan atas suatu gambaran yang baru maupun yang sudah ada sebelumnya. Serta bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran lembaga negara dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan dampaknya terhadap penguatan demokrasi. Memfokuskan penelitian pada peran lembaga negara untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang peran mereka dalam praktik tata kelola pemerintahan yang baik.

PEMBAHASAN

1. Peran Serta Pemerintah Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Berdasarkan Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Perkembangan zaman menuntut adanya keseimbangan dalam pemerintahan untuk mampu memberikan dan mewujudkan tujuan negara, salah satunya adalah mewujudkan dan membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Tindakan tersebut bukan hanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun perlu adanya keselarasan dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah turut mengambil posisi penting sebagai penopang dan pelaksana. Keberadaan lembaga pemerintah tersebut termasuk yang bersifat non pemerintah, berperan langsung dan memiliki hubungan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga lebih mampu mengetahui apa yang diperlukan oleh masyarakat pada tiap-tiap daerah. Berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh tiap-tiap lembaga dapat berpedoman menggunakan prinsip *good governance*. Seperti yang diketahui bahwa *good governance* ialah suatu konsep pemerintahan yang digunakan dalam mengelola segala sumber daya alam, sosial dan ekonomi yang stabil serta merata. Dengan begitu, setiap proses dalam pengelolaan manajemen tersebut dapat dipertanggungjawabkan, efisien, dan efektif. Adapun prinsip dari *good governance* sendiri terdiri dari :

a. **Transparansi**

Keterbukaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum yaitu mampu menghindari terjadinya kesalahpahaman. Dalam hal penerapan prinsip transparansi ini masyarakat, dapat memberikan kontribusi dengan memantau kinerja yang akan atau sedang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintahan sehingga mampu mengetahui kegiatan serta pelaksanaan program-program yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu yang sudah terlaksana, sedang dilaksanakan, maupun rancangan program mendatang. Prinsip transparansi juga digunakan sebagai bentuk pemerintah untuk dapat memberikan informasi yang relevan dan jelas.

b. **Akuntabilitas**

Segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, wajib ada pelaporan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, dengan begitu dapat dilakukan evaluasi atas program-program yang telah dijalankan, apakah telah sesuai dengan yang sudah direncanakan atau tidak. Terdapat 3 tipe akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah yaitu, akuntabilitas administratif, akuntabilitas kebijakan publik, akuntabilitas keuangan.

c. **Responsibilitas**

Pemerintahan sebagai pelayan publik wajib memberikan tanggapan dan aktif terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat diwilayahnya tersebut. Aktif disini berarti, bahwa pemerintah harus selalu mencari tau apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak terjadi ketimpangan ataupun ketidakterlibatan peran pemerintah dalam urusan publik.

d. **Efektivitas dan efisiensi**

Segala bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah harus benar benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat di wilayah tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan serta sumber daya yang ada, jadi mampu untuk mencapai efektivitas serta efisiensi dalam pelaksanaannya.

e. **Partisipasi**

Keterlibatan dari masyarakat daerah untuk ikut menyuarakan haknya dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga yang memiliki kewenangan sehingga ada kontribusi yang diberikan oleh masyarakat.

Selain prinsip yang telah dijabarkan diatas, terdapat ciri-ciri dari *good governance* itu sendiri, antara lain :

- a. Mampu memberikan keadilan serta kesetaraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. Memiliki orientasi kedepan dengan diwujudkan melalui program program untuk sekarang dan masa mendatang.
- c. Menjadikan masyarakat menengah kebawah terutama masyarakat yang lebih membutuhkan sebagai sebuah prioritas.

- d. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik dan efisien sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dapat mewujudkan efektifitas.
- e. Pemerintah harus mampu dan terbuka terhadap kritikan, saran maupun keluhan yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian mengambil tindakan atas aduan tersebut.

Pemerintah melalui lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk meningkatkan perkembangan peran serta masyarakat dalam setiap proses pembangunan adalah sesuatu yang harus digencarkan. Pemerintah dapat menunjukkan kepada rakyat terkait visi dan misi sebenarnya dalam peningkatan kinerja. Pentingnya proses transparansi dan keterlibatan dari masyarakat dibutuhkan untuk mempermudah penerapan prinsip demokrasi dalam tata kelola pemerintah. “Good governance” dengan baik merupakan konsep penerapan manajemen pembangunan sehat, terstruktur, juga bertanggung jawab. Hal ini disesuaikan dengan demokrasi yang efisien agar menghindari terjadinya salah alokasi investasi langka serta mencegah terjadinya praktik korupsi politik dan administrasi, menerapkan konsep disiplin fiskal hingga menciptakan suatu kerangka hukum dan kerangka kerja politik yang matang untuk pertumbuhan wiraswasta. Transparansi selalu terkait dengan akuntabilitas dan partisipasi. Kemudian dengan penerapan “Good governance” sejalan dengan cita-cita demokrasi yang efektif, tata kelola pemerintahan yang baik adalah penyedia manajemen layanan pembangunan yang bertanggung jawab yang mengurangi korupsi baik di ranah politik maupun administratif, khususnya dalam pelaksanaan fungsi, layanan, sarana, dan infrastruktur anggaran.

Konsep good governance diterapkan oleh pemerintah sejak dulu. Namun, tetap ada orang yang kesulitan untuk mengerti konsep pemerintahan. Banyak masyarakat yang belum memahami tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan. Karena itu, tata kelola dalam konteks ini tidak semata-mata mengacu pada susunan dan pengelolaan suatu organisasi. Adanya lembaga pemerintah diharapkan mampu menciptakan kondisi lingkungan politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya dapat berjalan dengan baik serta kondusif. Terdapat dua sektor lembaga yang memiliki keterlibatan langsung dengan penerapan prinsip good governance yaitu dari sektor swasta dan masyarakat sipil. Di segala aktivitas baik ekonomi, sosial, maupun politik, masyarakat sipil harus mampu terlibat aktif didalamnya, sektor swasta juga secara aktif mendukung aktivitas ekonomi yang akan meningkatkan pendapatan dan peluang kerja. Selain itu, dari sektor pemerintahan seperti para pejabat pemerintahan juga turut serta dalam proses penerapan prinsip good governance demi kebaikan bangsa di masa depan.

Keterlibatan masyarakat dalam sektor publik dalam pengambilan keputusan memiliki hak suara yang bebas dan berpartisipasi secara konstruktif. Masyarakat berperan aktif untuk memastikan semua kebijakan yang diberikan oleh pemerintah telah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting dan memberikan manfaat bagi kegiatan pembangunan. Pejabat pemerintah juga harus menerapkan prinsip good governance serta memiliki peran yang sangat penting untuk kepentingan dan pembangunan bangsa. Akuntabilitas kinerja implementasi merupakan prasyarat bagi aparatur pemerintah. Pimpinan pemerintahan harus mampu menjabarkan kebijakan, program, dan tindakan yang telah dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan tiga pihak dan penggunaan jangka pendek. Kantor pemerintahan, meliputi pemerintahan, sumber daya manusia, dan lembaga (instansi). Menurut konsep akuntabilitas, banyak kebijakan dan tindakan pejabat pemerintah harus mencakup analisis biaya dan manfaat dalam bidang kesehatan dan kebijakan atau kegiatan lainnya. Selain itu, akuntabilitas sangat terkait dengan efisiensi dalam mencapai tujuan atau target atau aturan program. Oleh karena itu, tidak mungkin memisahkan tujuan, kebijakan, dan tindakan pejabat pemerintah dari cita-cita tersebut. Informasi mengenai kebijakan, rencana, dan kegiatan pemerintah pusat dan daerah, serta informasi lain yang tidak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, tersedia bagi pejabat pemerintah dan rekanan masyarakatnya. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk berbagi informasi atau bekerja sama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berdampak pada mereka. Strategi pemerintah yang menjunjung tinggi dan

memperkuat seluruh kegiatan hukum untuk kepentingan lingkungan eksternal (masyarakat luas) serta orang-orang yang mempunyai persamaan satu sama lain, misalnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk mengambil bagian dalam penciptaan badan hukum dan undang-undang. Penyelenggaraan good governance dapat dilakukan oleh otoritas yang berwenang serta masyarakat sebagai manajemen sosial yang sering terlibat. UUD harus menjadi landasan bagi pelaksanaan peraturan yang mengatur kekuasaan dan penggunaan wewenang oleh organ dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang. Salah satu prinsip utama pengaturan kekuasaan adalah bahwa kekuasaan negara bersifat jelas, terbatas, dan terbatas. Selain pemantauan masyarakat secara langsung, pengembangan konsep akuntabilitas dan keterlibatan publik harus selalu berjalan seiring dengan pengaturan kewenangan organ atau pejabat.

Salah satu keterlibatan pemerintah dalam mewujudkan prinsip good governance yaitu lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan menjadi lembaga non kementerian. Lembaga tersebut yaitu Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan mempunyai tugas untuk mencapai tata pemerintahan yang baik serta memiliki peran dalam membantu Presiden untuk merencanakan dan menilai pelaksanaan pembangunan nasional. Menurut Bappenas, pemerintahan yang memiliki wawasan yang luas dan kedepan menjadi dasar untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pemerintahan yang memiliki sifat terbuka, pemerintahan yang sigap, cepat dan tanggap dalam mewujudkan partisipasi masyarakat, tata pemerintahan akuntabel, pemerintahan yang selalu profesional, serta pemerintahan yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Dalam hal ini Bappenas menerapkan prinsip perencanaan yang akuntabel dimana Bappenas harus bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembangunan nasional yang didasarkan pada data dan analisis serta mengukur dampak dari pelaksanaan rencana tersebut. Dalam prinsip transparansi atau memiliki sifat yang terbuka, Bappenas harus menjalankan fungsinya untuk memfasilitasi pengalokasian anggaran pembangunan yang dilakukan secara transparan agar publik mengetahui dan memahami dana yang digunakan untuk pembangunan dipakai dengan sesuai dan untuk mencegah terjadinya korupsi. Bappenas juga mendorong partisipasi masyarakat untuk proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah untuk mewujudkan pemerintahan yang sigap, cepat, dan tanggap terhadap keluhan masyarakat. Selain itu, Bappenas juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien guna apabila terjadi ketidaksesuaian dengan rencana dapat dievaluasi kembali. Program pembangunan yang berjalan tidak sesuai dengan peraturan dapat ditegakkan melalui hukum yang berlaku. Hal ini juga menjadi tugas atau peran Bappenas untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan membantu mencegah penyimpangan yang bisa merugikan masyarakat.

2. Strategi yang efektif untuk meningkatkan efektivitas implementasi peran lembaga negara

Konsep tata kelola pemerintahan yang baik mengutamakan pada suatu tatanan pemerintahan demokratis yang mengedepankan keseimbangan hubungan antar lembaga pemerintahan di berbagai tingkat.baik di tingkat. Kerangka kerja tata kelola pemerintahan yang baik dicapai melalui kesepakatan bersama antara pemerintah, sektor publik dan sektor swasta mengenai peraturan pemerintah. Bentuk kesepakatan ini meliputi berbagai metode, prosedur dan organisasi yang dapat digunakan oleh individu dan kelompok sosial untuk mengemukakan aspirasi serta menggunakan hak-hak hukumnya, menjalankan kewajibannya dan menyelesaikan berbagai persoalan di antara mereka. Untuk dapat memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dapat menggunkan beberapa pilar yang dapat memainkan peran penting dalam memperkuat demokrasi salah satunya dengan transparansi. Melalui transparansi dalam tata kelola pemerintahan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui dan memahami berbagai kebijakan pemerintah yang akan diambil. Kemudian partisipasi aktif masyarakat juga berperan penting dalam memperkuat demokrasi. Karena dengan melibatkan warga negara ke dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemerintah dapat lebih mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan kunci

sukses dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Ketika masyarakat merasa memiliki kepemilikan atas keputusan-keputusan yang diambil, mereka akan lebih bersedia untuk mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Sebaliknya, pemerintah yang mampu melibatkan masyarakat secara efektif akan mendapatkan masukan yang berharga dan dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi keputusan pemerintah tetapi juga memberdayakan warga negara, membuat mereka merasa lebih terhubung dengan proses demokrasi. Selanjutnya aspek mendasar dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah kepatuhan terhadap aturan hukum. Ketika hukum diterapkan secara adil dan konsisten, maka akan tercipta lingkungan yang stabil di mana hak-hak dilindungi, dan keadilan dapat diakses. Kerangka hukum ini sangat penting bagi demokrasi karena mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum. Tanpa adanya hukum yang kuat dan penegakannya yang efektif, partisipasi dalam proses politik dapat bertransformasi menjadi sesuatu yang anarkis. Untuk mencapai pemerintahan yang baik, diperlukan suatu sistem maupun aturan hukum yang kokoh serta memberikan kepastian. Masyarakat dapat memiliki kepercayaan jika penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan tanpa diskriminasi. Namun sebaliknya, jika hukum tidak ditegakkan atau bersifat diskriminatif, kepercayaan terhadap pemerintah akan memudar.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mempunyai tugas yang sangat sentral dalam merumuskan arah pembangunan di Indonesia. Tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas adalah memastikan pembangunan nasional berjalan dengan lancar, efektif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bappenas berperan sebagai koordinator dan perencana utama. Dalam melaksanakan tugasnya, Bappenas harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini mencakup:

1. Memaksimalkan manajemen kompetensi untuk meningkatkan akuntabilitas dan penegakan prinsip anti korupsi
2. Jaminan terhadap transparansi serta kemudahan dalam mengakses informasi bagi masyarakat maupun pemangku jabatan
3. Mengoptimalkan program pembangunan nasional sebagai prioritas negara
4. Peningkatan kualitas terhadap Sumber Daya Manusia di lingkungan Bappenas

Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dapat berperan penting sebagai koordinator dalam mewujudkan good governance di Indonesia melalui berbagai strategi. Bappenas berperan utama dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional yang mengedepankan prinsip-prinsip good governance seperti merancang rencana pembangunan untuk jangka panjang, menengah, dan tahunan yang mengintegrasikan aspek-aspek good governance. Bappenas dalam hal ini juga memasukkan indikator-indikator good governance untuk pengelolaan yang baik mencakup aspek-aspek seperti keterbukaan, tanggung jawab, kepatuhan terhadap hukum, dan partisipasi dalam dokumen perencanaan. Sebagai lembaga perencana pusat, Bappenas dapat mengkoordinasikan upaya dari kementerian/lembaga dalam menerapkan good governance. Bappenas memfasilitasi forum koordinasi antar lembaga untuk menyelaraskan program-program terkait good governance. Bappenas dalam hal ini mengadakan pertemuan rutin yang melibatkan perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga untuk membahas dan menyelaraskan inisiatif good governance. Bappenas dapat berperan dalam memantau dan mengevaluasi penerapan good governance. Melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif untuk mengukur pencapaian good governance di berbagai sektor. Bappenas melakukan evaluasi secara berkala dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada kementerian/lembaga terkait sebagai bagian dari perannya dalam koordinasi pembangunan nasional. Bappenas memiliki unit kerja bernama Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah (PEPPD) yang mengemban tanggung jawab penting. Direktorat ini berperan dalam mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan, serta menilai sejauh mana kebijakan pembangunan daerah telah dilaksanakan dan mencapai

targetnya. Selain itu, PEPPD juga diberi mandat untuk mengawasi bagaimana pelayanan publik diselenggarakan di tingkat daerah.

Bappenas melaksanakan kegiatan Evaluasi Pembangunan Daerah (EPD) bertujuan untuk mengukur capaian tujuan pembangunan nasional pada tingkat daerah. Selain itu, EPD juga melakukan analisis terhadap masalah-masalah yang timbul dan faktor-faktor penentu kesuksesan dalam implementasi pembangunan tersebut. Bappenas dapat mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam menerapkan good governance. Menyelenggarakan pelatihan dan workshop tentang prinsip-prinsip good governance bagi aparatur pemerintah. Bappenas dapat merancang dan mengkoordinasikan program pelatihan komprehensif yang mencakup aspek-aspek penting good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Menyusun panduan dan standar operasional prosedur (SOP) terkait implementasi good governance di berbagai level pemerintahan. Bappenas mengembangkan sistem penilaian dan evaluasi kinerja aparatur pemerintah yang mengintegrasikan aspek-aspek good governance. Hal ini dapat mendorong aparatur untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pekerjaan sehari-hari. Bappenas dapat menjadi penggerak dalam tata kelola pemerintahan. Bappenas berperan sebagai koordinator dalam perencanaan pembangunan nasional yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Lembaga ini menyelenggarakan sinkronisasi dan penyusunan rancangan kebijakan terkait perencanaan pembangunan, termasuk strategi pembangunan skala nasional, serta menentukan arahan kebijakan yang mencakup berbagai sektor dan lintas sektor. Mengembangkan dan mengkoordinasikan implementasi Sistem Pemerintahan Elektronik (SPBE) bertujuan untuk memperbaiki transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. SPBE memungkinkan pemerintah untuk menyediakan akses yang lebih mudah kepada masyarakat terhadap data dan informasi pemerintah. Dengan sistem ini, masyarakat dapat melihat keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintah secara lebih jelas, sehingga meningkatkan akuntabilitas.

Pemerintah telah dan sedang melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan efektivitas lembaga negara. Pemerintah mengembangkan Sistem pelayanan yang dapat diandalkan dan dipercaya, serta mudah diakses oleh masyarakat secara luas. Pengaturan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah dalam hal ini sangat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan memperkuat peran dalam sektor bisnis serta mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Pengembangan ini dilaksanakan secara sistematis oleh pemerintah melalui langkah-langkah yang realistis dan terukur. Untuk mencapai layanan yang andal dan terpercaya, diperlukan infrastruktur digital yang memadai. Ini mencakup penyediaan jaringan internet yang luas dan berkualitas, serta portal informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, memungkinkan masyarakat mengakses ke layanan pemerintah kapan pun dan di mana pun tanpa batasan geografis. Komitmen dari pemimpin pemerintah sangat penting dalam mendukung setiap proses e-government. Pemimpin harus mengambil keputusan strategis untuk mengimplementasikan sistem pelayanan berbasis elektronik, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Peningkatan efektivitas lembaga negara memiliki dampak signifikan terhadap kualitas demokrasi di suatu negara. Pertama, peningkatan efektivitas lembaga negara dapat memperkuat sistem checks and balances, yang merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat. Ketika lembaga-lembaga seperti legislatif, yudikatif, dan komisi-komisi independen berfungsi secara efektif, mereka dapat menjalankan peran pengawasan terhadap pemerintah dengan lebih baik. Hal ini mencegah terjadinya dominasi kontrol eksekutif yang berlebihan, yang sering kali menjadi ancaman bagi demokrasi. Lembaga-lembaga yang efektif dapat memastikan bahwa kekuasaan tidak tersentralisasi pada satu pihak saja, melainkan terdistribusi secara merata, sehingga menciptakan keseimbangan kekuasaan yang diperlukan dalam sistem demokratis. Kedua, lembaga negara yang

efektif dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketika lembaga-lembaga pemerintah mampu menjalankan fungsinya dengan baik, masyarakat cenderung lebih puas dengan kinerja pemerintah dan lebih percaya pada proses demokratis. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif warga negara dalam proses politik, yang merupakan elemen kunci dari demokrasi yang berkualitas. Selain itu, lembaga yang efektif juga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kehendak rakyat. Ketiga, efektivitas lembaga negara berperan penting dalam menjaga integritas proses demokrasi, terutama dalam hal pemilihan umum dan penegakan hukum. Lembaga penyelenggara pemilu yang efektif dapat memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara bebas, adil, dan transparan, yang merupakan indikator penting dari kualitas demokrasi. Sementara itu, lembaga penegak hukum yang efektif dapat membantu mencegah dan menindak praktik-praktik korupsi serta pelanggaran hukum lainnya yang dapat mengancam integritas sistem demokrasi. Dengan demikian, peningkatan efektivitas lembaga negara tidak hanya memperkuat proses demokrasi, tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Kedaulatan pemerintah menjadi salah satu syarat dalam berdirinya suatu negara. Pemerintah yang menjadi wakil rakyat harus melakukan pengelolaan dan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pelaksanaan prinsip *good governance* di Indonesia sayangnya dinilai masih belum maksimal. Dalam hal ini, masyarakat berperan aktif untuk memastikan semua kebijakan yang diberikan oleh pemerintah telah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu lembaga yang mewujudkan prinsip *good governance* dari lembaga non kementerian adalah Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Bappenas memiliki peran dalam membantu Presiden untuk merencanakan dan menilai pelaksanaan pembangunan nasional. Bappenas menerapkan prinsip perencanaan yang akuntabel dimana Bappenas harus bertanggung jawab atas penyusunan rencana pembangunan nasional yang didasarkan pada data dan analisis serta mengukur dampak dari pelaksanaan rencana tersebut. Selain itu, Bappenas juga menjalankan prinsip transparansi, mendorong partisipasi masyarakat, bertanggung jawab untuk memastikan semua program pembangunan yang akan datang dapat dijalankan secara efektif dan efisien, serta berperan dalam mencegah penyimpangan yang busa merugikan masyarakat. Bappenas dapat berperan penting sebagai koordinator dalam mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengkoordinasikan upaya dari kementerian/lembaga, memfasilitasi forum koordinasi antar lembaga, memantau serta mengevaluasi penerapan *good governance*, mendorong peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, merancang dan mengkoordinasikan program pelatihan komprehensif, menyusun panduan SOP terkait implementasi *good governance*, serta menjadi koordinator dalam perencanaan pembangunan nasional yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Peningkatan efektivitas memiliki dampak terhadap kualitas demokrasi yaitu memperkuat sistem checks and balances, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan implementasi kebijakan, berperan penting dalam menjaga integritas proses demokrasi, dan membantu mencegah serta menindak praktik-praktik korupsi serta pelanggaran hukum lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis B. (2012). Hakekat Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (*Good governance*). *Legal Pluralisme*, 2(2).
- Duadji, N. (2012). *Good governance* dalam Pemerintah Daerah. *Mimbar*, 28(2).
- Febriandy, R,K dan Wahid,U. (2024). Kemunduran Demokrasi di Indonesia: Analisis Laporan Varieties Of Democracy (V-DEM) Institute 2024, *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*

(Kaganga), 7 (2), 1047.

- Khairudin, d. (2022). MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK DI INDONESIA: PERAN GOOD GOVERNANCE DAN E-GOVERNMENT. Banyuwangi: Amerta Media.
- Kamarasyid, A. (2019). Peranan Kepemimpinan dalam Menerapkan Prinsip-Prinsip Good governance di Instansi Pemerintahan Daerah. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 10(2).
- Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good governance. *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285
- Maranjaya, A. K. (2022). Good governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Sosial Teknologi*, 2(11), 929-941.
- Mariano, S. Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo, 10.
- Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. *Jurnal ilmiah ilmu Pemerintahan*, 1(3), 19-29.
- Nely, S. (2023). Peran Good Governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan E-Government Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja. Universitas Bina Taruna Gorontalo, 10(2).
- Nely, S. (2023). Peran Good governance Melalui Reformasi Birokrasi Dan E-Government Guna Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Kinerja. Universitas Bina Taruna Gorontalo, 10(2).
- Qoroni, W., & Winarwati, I. (2021). Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia. *Inicio Legis*, 2(1)
- Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- Soeprapto, R. (2003). Pengembangan kapasitas pemerintah daerah menuju good governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik FIA Universitas Brawijaya*, Nomor, 4, 2003.
- Sutrisna, W., & Setiawati, N. P. A. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Good governance Pada Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 6(2).
- Tawakkal, M. I. (2019). Tesis: "Pengaruh Demokrasi, Efektivitas Pemerintahan dan Kualitas Regulasi Terhadap Tingkat Pengendalian Korupsi" (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2019).
- Tomuka, S. (2013). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung. *Jurnal Politico*.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Kajian Teoritis: Strategi Pengembangan E-Government dalam Pelayanan Administrasi Secara Daring, *PAJOUL (Pakuan Justice Journal Of Law)*, 1(2), 20.
- ARTIKEL DARING/ONLINE
- Kementrian PPN/Bappenas mengenai kesiapan kementrian PPN/Bappenas dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan anggaran Pembangunan nasional, di akses pada tanggal 10 november 2024, <https://jdih.bappenas.go.id/artikel/detailartikel/647>.